



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang

Dzaki Ahmad Syawal^{1*}, Muchtar², Mochammad Heru Widodo³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang, Indonesia^{1,2,3}

*Email i: adzakiahmadsyawal@gmail.com; muchtaralam99@gmail.com; herwido123@gmail.com

Diterima: 26-09-2026 | Disetujui: 30-09-2026 | Diterbitkan: 02-10-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), the General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum/DAU), and the Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus/DAK) on Capital Expenditure in Jombang Regency, both partially and simultaneously. The study employed a quantitative approach based on the positivist paradigm. The data analyzed consisted of PAD, DAU, DAK, and Capital Expenditure data obtained from the Budget Realization Reports (Laporan Realisasi Anggaran/LRA) of Jombang Regency for the period of 2016–2025. The sample was determined using a purposive sampling technique by selecting all data that met the established research criteria during the study period. Data analysis was conducted using descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results indicate that PAD, DAU, and DAK do not have a significant effect on Capital Expenditure, either partially or simultaneously. Therefore, local governments are expected to improve the effectiveness of planning and budgeting processes while maintaining a balanced allocation between operational expenditure and capital expenditure to support sustainable regional development.

Keywords: Local Own-Source Revenue (PAD); General Allocation Fund (DAU); Special Allocation Fund (DAK); Capital Expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik. Data yang dianalisis berupa data PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jombang selama periode 2016–2025. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mengambil seluruh data yang memenuhi kriteria penelitian selama periode tersebut. Analisis data meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses perencanaan dan penganggaran dengan tetap menjaga proporsi yang seimbang antara belanja operasional dan Belanja Modal guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Katakunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Belanja Modal.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syawal, D. A., Muchtar, M., & Widodo, M. H. . (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(4), 4122-4138. <https://doi.org/10.63822/gkkm2841>

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi. Kewenangan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan percepatan pembangunan daerah. Untuk mendukung tujuan itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Belanja daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Alokasi belanja digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas belanja daerah dipengaruhi kemampuan pemerintah daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola dana transfer fiskal secara efektif dan akuntabel (Dewi & Oktafia, 2026). Belanja modal merupakan komponen utama belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap yang bermanfaat jangka panjang. Namun, realisasi belanja modal di berbagai daerah masih belum optimal dan cenderung berfluktuasi, sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya sumber pendanaan pemerintah daerah (Widodo, 2019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan daerah. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah didukung kemampuan fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, serta sumber pembiayaan lain yang sah. Transfer ke daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jenis transfer lainnya. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan sumber pembiayaan daerah, seperti pinjaman daerah, sesuai kapasitas fiskalnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah membiayai pemerintahan secara mandiri. Dalam era otonomi daerah, peningkatan PAD menjadi indikator penting kemandirian fiskal, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut penyesuaian belanja dan penetapan skala prioritas pembangunan (Sahrudin & Syahid, 2025). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, sehingga kemampuan membiayai pembangunan termasuk belanja modal semakin kuat.

Bagi daerah dengan kemandirian fiskal rendah, Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Ghonniyu (2024), DAU dialokasikan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi. Penyaluran DAU bertujuan memastikan setiap daerah memiliki kapasitas fiskal memadai untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, termasuk membiayai belanja modal. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan sektor prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Buana (2022), DAK dialokasikan untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah yang belum memenuhi standar pelayanan. Melalui DAK, pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui belanja modal untuk infrastruktur dan

pengadaan aset tetap.

Secara teoritis, PAD, DAU, dan DAK merupakan sumber utama pendanaan pemerintah daerah yang berpotensi memengaruhi besarnya alokasi belanja modal. PAD menunjukkan tingkat kemandirian fiskal, DAU memperkuat kapasitas fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD), sedangkan DAK secara khusus mendukung program prioritas nasional yang umumnya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Dengan demikian, besarnya PAD, DAU, dan DAK diperkirakan berpengaruh terhadap kemampuan daerah meningkatkan alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan realisasi anggaran menarik untuk dianalisis selama periode 2016–2025. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, dan Total Belanja Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016–2025 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, dan Total Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016–2025

Tahun	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal	Total Belanja Daerah
2016	374.141.185.825	1.111.301.450.000	282.874.988.590	364.901.756.772	2.364.581.573.271
2017	521.236.583.750	1.091.779.457.000	322.286.044.858	387.322.559.622	2.401.430.893.002
2018	438.197.175.438	1.091.779.457.000	341.135.141.100	293.715.521.337	1.938.687.132.724
2019	476.662.933.476	1.126.979.694.000	329.996.636.026	374.841.005.379	2.653.744.687.028
2020	468.627.918.703	1.016.614.394.000	334.946.162.762	243.636.238.818	2.030.845.567.427
2021	665.844.012.375	1.005.652.395.000	357.565.521.714	372.351.774.099	2.785.980.355.229
2022	522.526.189.811	1.001.940.492.969	446.995.516.586	358.483.608.704	2.878.936.347.836
2023	628.096.587.719	1.053.294.105.376	409.853.931.040	244.054.491.039	2.940.471.390.172
2024	634.636.679.616	1.104.018.395.235	400.708.503.486	263.074.730.214	3.119.165.420.250
2025	838.274.581.100	1.124.741.367.990	369.614.551.422	333.731.413.091	3.018.480.621.464

(Sumber: BKAD Kabupaten Jombang, 2026)

Berdasarkan data realisasi APBD, kondisi keuangan Kabupaten Jombang selama periode penelitian berfluktuasi, baik pada pendapatan maupun belanja daerah. Struktur penerimaan daerah masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, terutama DAU dan DAK. PAD cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dana transfer. Kondisi ini menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Jombang masih dipengaruhi dukungan pemerintah pusat, yang berdampak pada besarnya alokasi belanja modal untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Otonomi daerah bertujuan menciptakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil, selaras, dan berimbang, sekaligus memperkuat prinsip *good governance* melalui akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya pemanfaatan TKD dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat juga masih tinggi, sehingga kemampuan fiskal daerah belum sepenuhnya ditopang PAD. Kondisi tersebut menunjukkan

kemandirian fiskal daerah perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah agar pembangunan, termasuk belanja modal, dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan (Pradana & Handayani, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, PAD, DAU, dan DAK merupakan sumber pendanaan yang berpotensi memengaruhi besarnya alokasi belanja modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap belanja modal di Kabupaten Jombang penting dilakukan untuk menganalisis kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan, sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian fiskal dan ketergantungannya terhadap TKD. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan serta pelayanan publik.

Mengacu pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara parsial serta simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik karena berlandaskan asumsi bahwa fenomena sosial dapat diukur secara objektif melalui data kuantitatif. Data dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hubungan sebab akibat antarvariabel. Pemilihan pendekatan tersebut sejalan dengan Risnita dkk. (2024) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berlandaskan paradigma postpositivistik, menitikberatkan pengumpulan dan analisis data numerik, serta menguji teori melalui analisis statistik.

Objek penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang periode 2016–2025, dengan fokus pada data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jombang selama tiga bulan pada tahun 2026. Rencana penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 2026 (Maret–Juli)
1	Persiapan Penelitian	
	a. Pengajuan Judul	Maret
	b. Pengajuan Proposal	April
	c. Perijinan Penelitian	Mei
2	Pelaksanaan Penelitian	
	a. Pengumpulan Data	Juni
	b. Analisis Data	Juni–Juli
3	Tahap Penyusunan Laporan	Juli

(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Sampel penelitian ini adalah data PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jombang selama 10 tahun (2016–2025), sehingga besar sampel adalah 10 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan kesesuaian

karakteristik data sekunder berbentuk *time series* dengan tujuan penelitian (Soesana dkk., 2023), yang kemudian diterapkan melalui *total sampling*.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu Belanja Modal (Y), serta tiga variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3). Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi (Jirwanto dkk., 2024). PAD merupakan penerimaan daerah dari potensi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Kamala dkk., 2025). DAU dan DAK merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antardaerah serta mendanai program prioritas nasional (Sisilia & Harsono, 2021). Seluruh variabel diukur menggunakan total realisasi pada setiap tahun anggaran selama periode 2016–2025.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari dokumen resmi Laporan Realisasi APBD Kabupaten Jombang, dilengkapi data primer melalui wawancara dengan pihak yang berwenang dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD (Soesana dkk., 2023). Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data realisasi PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal, serta didukung peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan (Nasution, 2023). Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Analisis data dilakukan melalui analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Analisis statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel (Machali, 2021). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor* dan *Tolerance*), uji heteroskedastisitas (Glejser), dan uji autokorelasi (Durbin-Watson). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal;

α = konstanta;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi;

X_1 = PAD;

X_2 = DAU;

X_3 = DAK;

E = *error term*.

Uji hipotesis meliputi uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (Riswan & Dunan, 2019). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, dengan kriteria H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan, dengan kriteria H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$. Adapun koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen, dengan dasar interpretasi nilai *Adjusted R Square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang. Data yang dianalisis merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang selama sepuluh tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2025. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan uji statistik pada aplikasi IBM SPSS Statistics.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
Jumlah Data	10	10	10	10
Minimum	374.141.185.825	1.001.940.492.969	282.874.988.590	243.636.238.818
Maksimum	838.274.581.100	1.126.979.694.000	446.995.516.586	387.322.559.622
Rata-rata	556.824.384.781,30	1.072.810.120.857,00	359.597.699.758,40	323.611.309.907,50
Standar Deviasi	135.943.971.706,305	49.303.939.662,343	48.375.790.248,923	57.122.060.032,726

(Sumber: Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 3, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp374.141.185.825 yang merupakan realisasi PAD tahun 2016, dan nilai maksimum sebesar Rp838.274.581.100 pada tahun 2025. Rata-rata PAD selama periode 2016–2025 mencapai Rp556.824.384.781,30 dengan standar deviasi Rp135.943.971.706,305. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data PAD relatif rendah atau homogen.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp1.001.940.492.969 pada tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar Rp1.126.979.694.000 pada tahun 2019. Rata-rata DAU mencapai Rp1.072.810.120.857,00 dengan standar deviasi Rp49.303.939.662,343, yang menunjukkan penyebaran data DAU relatif rendah atau homogen. Adapun variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar Rp282.874.988.590 pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar Rp446.995.516.586 pada tahun 2022. Rata-rata DAK mencapai Rp359.597.699.758,40 dengan standar deviasi Rp48.375.790.248,923, yang juga menunjukkan penyebaran data yang homogen.

Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar Rp243.636.238.818 pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar Rp387.322.559.622 pada tahun 2017. Rata-rata Belanja Modal mencapai Rp323.611.309.907,50 dengan standar deviasi Rp57.122.060.032,726. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data Belanja Modal relatif rendah atau homogen.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas dilakukan dengan meninjau nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang

(Widodo, et al.)

(VIF). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,700	1,429
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,733	1,363
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,564	1,773

(Sumber: Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Glejser

Variabel	Nilai Signifikansi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,198
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,075
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,329

(Sumber: Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 5, nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson dan dilanjutkan dengan uji *Run Test*. Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 2,644, dengan perbandingan $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$ $= 1,9837 \leq 2,644 \leq 3,4747$. Hasil tersebut menunjukkan nilai DW berada pada daerah tidak pasti (*inconclusive region*), sehingga dilakukan uji *Run Test* sebagai pengujian lanjutan. Hasil uji *Run Test* menunjukkan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 1,000, lebih besar dari 0,05 ($1,000 > 0,05$). Dengan demikian, residual pada model regresi bersifat acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, sehingga model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal. Hasil analisis regresi berganda disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error
Constant	464.307.632.927,644	661.140.240.308,002
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,032	0,194
Dana Alokasi Umum (DAU)	-0,006	0,522
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-0,425	0,606

(Sumber: Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 6, model hubungan antarvariabel dinyatakan dalam persamaan regresi berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang
(Widodo, et al.)

$$Y = 464.307.632.927,644 + 0,032X_1 - 0,006X_2 - 0,425X_3 + e \quad (2)$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal;

α = konstanta;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi;

X_1 = PAD;

X_2 = DAU;

X_3 = DAK;

e = error term.

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta sebesar 464.307.632.927,644 menunjukkan bahwa apabila nilai PAD, DAU, dan DAK dianggap bernilai nol, maka nilai Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp464.307.632.927,644. Koefisien regresi PAD sebesar 0,032 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar Rp1, dengan asumsi DAU dan DAK tetap, akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp0,032. Koefisien positif ini menunjukkan hubungan searah antara PAD dan Belanja Modal. Koefisien regresi DAU sebesar -0,006 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar Rp1, dengan asumsi PAD dan DAK tetap, akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp0,006. Koefisien negatif ini menunjukkan hubungan berlawanan arah antara DAU dan Belanja Modal. Adapun koefisien regresi DAK sebesar -0,425 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar Rp1, dengan asumsi PAD dan DAU tetap, akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp0,425. Koefisien negatif ini juga menunjukkan hubungan berlawanan arah antara DAK dan Belanja Modal.

Hasil Uji Hipotesis

Uji t (parsial) dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t Hitung	t Tabel (df = 10-4 = 6)	Signifikansi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,166	2,44691	0,873
Dana Alokasi Umum (DAU)	-0,011	2,44691	0,992
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-0,700	2,44691	0,510

(Sumber: Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 7, variabel PAD memperoleh nilai t hitung sebesar 0,166, lebih kecil daripada t tabel sebesar 2,44691 ($0,166 < 2,44691$), dengan nilai signifikansi 0,873 lebih besar dari 0,05 ($0,873 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU memiliki nilai t hitung sebesar -0,011, lebih kecil daripada t tabel sebesar 2,44691 ($0,011 < 2,44691$), dengan nilai signifikansi 0,992 lebih besar dari 0,05 ($0,992 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun variabel DAK memperoleh nilai t hitung sebesar -0,700, lebih kecil daripada t tabel sebesar 2,44691 ($0,700 < 2,44691$), dengan nilai signifikansi 0,510 lebih besar dari 0,05 ($0,510 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima dan H_3 ditolak, sehingga secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap

Belanja Modal.

Uji F (simultan) dilakukan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)

F Hitung	F Tabel (df1 = 3, df2 = 6)	Signifikansi
0,240	4,757	0,865

(Sumber: Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 8, nilai F hitung sebesar 0,240 lebih kecil daripada F tabel sebesar 4,757 ($0,240 < 4,757$), dengan nilai signifikansi 0,865 lebih besar dari 0,05 ($0,865 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga secara simultan PAD, DAU, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square
0,327	0,107

(Sumber: Data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 9, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,107. Nilai tersebut menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan mampu menjelaskan variasi Belanja Modal sebesar 10,7%, sedangkan sisanya sebesar 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan fiskal, setiap daerah perlu mengenali potensi serta mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih optimal dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, terutama melalui PAD, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya (Rizal & Erpita, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang selama periode 2016–2025.

Berdasarkan data realisasi APBD, rata-rata besar PAD Kabupaten Jombang pada periode penelitian tidak sampai dua kali lipat dari besarnya Belanja Modal, yaitu 178%. Apabila ditinjau dari nilai koefisien regresi, variabel PAD memiliki koefisien positif yang menunjukkan hubungan searah dengan Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PAD cenderung diikuti oleh peningkatan Belanja Modal. Namun, besarnya pengaruh tersebut relatif kecil, yaitu hanya sebesar Rp0,032 untuk setiap kenaikan PAD sebesar Rp1,00. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan Belanja Modal.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Alpi & Sirait (2022) yang menyatakan bahwa tidak signifikannya pengaruh PAD terhadap Belanja Modal disebabkan oleh peningkatan PAD yang tidak diikuti

dengan peningkatan alokasi Belanja Modal. Putri dkk. (2024) juga menjelaskan bahwa fluktuasi PAD Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi pertumbuhan ekonomi, serta efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Tonapa (2024) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten dan kota. Dewi & Oktafia (2026) juga memperkuat bahwa PAD memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di luar PAD hanya sebesar 20%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Jombang masih relatif rendah, sehingga pemenuhan kebutuhan belanja daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan selain PAD, terutama dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini diduga menjadi salah satu penyebab belum signifikannya pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Pemerintah Kabupaten Jombang perlu terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan PAD, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan pemungutan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset dan potensi ekonomi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat sebagai konsekuensi atas pelaksanaan desentralisasi dan pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Salah satu bentuk Dana Perimbangan adalah DAU, yang bertujuan mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sehingga setiap daerah memiliki kapasitas memadai dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya (Kuntadi dkk., 2022). Berdasarkan hasil pengujian, DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang selama periode 2016–2025.

Berdasarkan data realisasi APBD, rata-rata besar DAU Kabupaten Jombang pada periode penelitian mencapai lebih dari tiga kali lipat dari besarnya Belanja Modal, yaitu 341%. Nilai koefisien regresi pada variabel DAU menunjukkan arah hubungan negatif terhadap Belanja Modal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan DAU cenderung diikuti oleh penurunan Belanja Modal. Namun, pengaruh tersebut relatif kecil, yaitu sebesar Rp0,006 terhadap Belanja Modal untuk setiap kenaikan DAU sebesar Rp1,00.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Safitri (2023) serta Manurung & Sembiring (2024) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Hidayati dkk. (2022), kondisi tersebut dapat terjadi karena sebagian besar DAU yang diterima pemerintah kabupaten/kota lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga porsi anggaran yang tersedia untuk Belanja Modal menjadi relatif lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata realisasi DAU memberikan kontribusi sebesar 42% terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Jombang. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan belanja daerah. Namun, pemanfaatan DAU diduga lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja selain Belanja Modal, terutama belanja operasional.

Nurdyastuti dkk. (2024) menjelaskan bahwa DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*), sehingga penggunaannya tidak terikat pada program atau kegiatan tertentu. Dana tersebut ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme pemerataan kemampuan keuangan daerah serta menggantikan sistem transfer berupa subsidi Instruksi Presiden (Inpres) dan daerah otonom. Oleh karena itu, besaran DAU yang diterima setiap daerah dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer kepada pemerintah daerah melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah DAK yang termasuk dalam kategori transfer bersyarat (*conditional transfer*). Penyaluran DAK bertujuan mendukung pembiayaan kegiatan atau sektor tertentu yang menjadi prioritas nasional, meskipun kewenangan pelaksanaannya telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah (Hadi & Mahi, 2024). Berdasarkan hasil pengujian, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang selama periode 2016–2025.

Nilai koefisien regresi pada variabel DAK menunjukkan arah hubungan negatif terhadap Belanja Modal. Artinya, setiap kenaikan DAK cenderung diikuti oleh penurunan Belanja Modal. Namun, pengaruh tersebut relatif kecil, yaitu sebesar Rp0,425 terhadap Belanja Modal untuk setiap kenaikan DAK sebesar Rp1,00. Hasil penelitian ini didukung oleh Cindriyanti dkk. (2024) yang menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, yang diduga disebabkan oleh kontribusi DAK yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Cahyani (2024) juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah cenderung memanfaatkan DAK untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas sesuai dengan ketentuan penggunaannya, sehingga alokasi untuk Belanja Modal tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata realisasi DAK tercatat sebesar 115%. Meskipun tingkat realisasi tersebut tergolong tinggi, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan alokasi Belanja Modal. Sebaliknya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan DAK di Kabupaten Jombang lebih diarahkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pada sektor-sektor prioritas nasional, sehingga porsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal relatif lebih kecil. Meskipun nilai alokasi DAK relatif kecil, dana ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Hal tersebut disebabkan oleh sifat DAK yang merupakan dana transfer bersyarat, sehingga penggunaannya hanya dapat dialokasikan untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Sulaeman & Andriyanto, 2021).

Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal secara Simultan

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyediaan berbagai fasilitas pada sektor-sektor strategis melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk investasi pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian daerah. Berdasarkan hasil pengujian, secara simultan PAD, DAU, dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten

Jombang selama periode 2016–2025.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD, DAU, dan DAK hanya mampu menjelaskan sebesar 10,7% variasi Belanja Modal, sedangkan sebesar 89,3% variasi Belanja Modal dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal di Kabupaten Jombang tidak hanya dipengaruhi oleh PAD, DAU, dan DAK, tetapi juga oleh variabel lain yang belum dianalisis dalam penelitian ini. Temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Cindriyanti dkk. (2024), Hidayati dkk. (2022), Romadhon & Aji (2021), serta Pramudya & Abdullah (2021) yang menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata alokasi Belanja Modal hanya mencapai 13% dari total Belanja Daerah Kabupaten Jombang. Persentase tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal belum menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah selama periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk membiayai komponen belanja lainnya, seperti belanja operasional. Akibatnya, alokasi PAD, DAU, dan DAK tidak secara langsung diarahkan untuk meningkatkan Belanja Modal.

Belanja Modal sebagai bentuk investasi pemerintah memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, Belanja Modal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pengadaan material serta jasa konstruksi. Adapun dalam jangka panjang, Belanja Modal berperan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Rambe & Iskandar, 2021). T. Wahyudi & Nofianti (2025) juga menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, kualitas tata kelola pemerintahan, serta efektivitas kebijakan transfer antar pemerintah.

Meskipun alokasi Belanja Modal yang besar mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin tercapainya efektivitas program. Efektivitas Belanja Modal sangat bergantung pada tingkat efisiensi dalam pengelolaan anggaran, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah. Efisiensi diwujudkan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta evaluasi yang konsisten guna memastikan setiap pengeluaran diarahkan pada kebutuhan prioritas dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, Belanja Modal terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penguatan sektor-sektor strategis, serta percepatan pembangunan infrastruktur (Haryati dkk., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang periode 2016–2025, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Meskipun koefisien regresi menunjukkan hubungan positif, pengaruh tersebut relatif kecil dan tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini

menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum mampu mendorong peningkatan alokasi Belanja Modal. Salah satu penyebabnya adalah kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang masih relatif rendah, yaitu rata-rata sebesar 20%, sehingga tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Jombang masih tergolong rendah dan pembiayaan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Koefisien regresi menunjukkan hubungan negatif dengan pengaruh yang relatif kecil. Rata-rata kontribusi DAU terhadap total Belanja Daerah mencapai 42%, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Namun, pemanfaatan DAU lebih banyak diarahkan untuk membiayai belanja operasional dibandingkan Belanja Modal sehingga peningkatan DAU tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal secara signifikan. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Meskipun DAK memiliki karakteristik sebagai dana transfer yang diperuntukkan bagi program prioritas nasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan DAK tidak selalu diikuti oleh peningkatan Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan DAK lebih difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas sesuai ketentuan penggunaannya, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan Belanja Modal belum signifikan.

Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jombang periode 2016–2025. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan variasi Belanja Modal sebesar 10,7%, sedangkan sebesar 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, rata-rata proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah hanya sebesar 13%, yang menunjukkan bahwa Belanja Modal belum menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, diharapkan terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan retribusi daerah, maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi Belanja Modal agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara belanja operasional dan Belanja Modal. Pengalokasian dana transfer yang lebih proporsional diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi Belanja Modal, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), SiLPA, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, atau tingkat kemandirian fiskal. Penelitian selanjutnya juga dapat memperpanjang periode pengamatan atau memperluas objek penelitian pada beberapa kabupaten/kota sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 400–404.
- Buana, H. C. (2022). Refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4).
- Cahyani, A. M. S. (2024). Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017–2019 [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49158>
- Cindriyanti, Hambani, S., & Anwar, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 9(3).
- Dewi, K. T. B., & Oktafia, R. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja daerah di Kabupaten Jombang periode 2005–2024. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.57094/jpe.v7i1.4090>
- Ghonniyu, A. R. (2024). Evaluasi penggunaan Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah [Disertasi, IPDN].
- Hadi, S., & Mahi, B. R. (2024). Peran Dana Alokasi Khusus fisik afirmasi terhadap pembangunan pendidikan daerah tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(1), 25–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i1.670>
- Hafizah, N., P, T. C. P., & Sari, M. (2025). Identifikasi variabel penelitian, jenis sumber data dalam penelitian pendidikan. 586–596.
- Haryati, D. C., Nurpiji, N., Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis efisiensi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia: Pendekatan data panel. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 139–153. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>
- Hidayati, S. W., Mas'ud, M., & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016–2020. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(2). <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/2724/1264>
- Himawan, H. S., Mubarok, A., Wahyuni, E., Sari, E. E., & Sukmawati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal di Indonesia. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 16(1).
- Jirwanto, H., Aqsa, M. A., Agusven, T., Herman, H., & Sulfitri, V. (2024). *Manajemen keuangan*. CV. Azka Pustaka.
- Kamala, J., Selvi Aulya Salsa, Nurilawati, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(7), 120–128. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5789>
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh pajak daerah, Dana Alokasi

- Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(3), 278–289. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Machali, I. (2021). Metode penelitian kuantitatif. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Manurung, S., & Sembiring, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2017–2021. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 50–62. <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3522>
- Maulana, R. A. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang kemandirian keuangan daerah Kota Bandung [Disertasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. CV. Harfa Creative.
- Nurdyastuti, T., Suroto, S., & Rodiza, M. R. (2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah di Soloraya: Peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. *Excellent*, 11(2), 137–148.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). Metode penelitian kuantitatif. Widya Gama Press.
- Pradana, Y. E., & Handayani, N. (2017). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal. *INOVASI*, 17(4), 653–660. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041>
- Putri, A. A., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 64–74. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1901>
- Rambe, S. S. U., & Iskandar, D. A. (2021). Peran belanja modal pada infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Pembangunan*, 3(2).
- Risnita, R., Muhajirin, & Asrulla. (2024). Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Riswan, & Dunan, H. (2019). Desain penelitian dan statistik multivariate. AURA.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1296>
- Romadhon, S. W., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Independent: Journal of Economics*, 1(2), 41–55. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i2.39131>
- Safitri, H. D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Kota Cirebon [Undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/17693/>
- Safriyeni, & Hidayat, T. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. *Jurnal Ekobistek*, 13(4).
- Sahrudin, & Syahid. (2025). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. *Sosio e-Kons*, 17(3).
- Sembiring, B. A. (2021). Strategi menstimulus ekonomi kreatif Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Imagine*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.35886/imagine.v1i1.180>

- Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010–2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6182>
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., Falani, I., Aswan, N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2023). Metodologi penelitian kuantitatif. Yayasan Kita Menulis.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175–200. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.99>
- Tonapa, V. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal kabupaten & kota di Sulawesi Selatan [Skripsi, Universitas Kristen Duta Wacana]. <https://repository.ukdw.ac.id/9698/>
- Utary, V. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah daerah Kota Sukabumi. 2(1). <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/jammi/article/view/1356/754>
- Wahyudi, R. (2019). Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Wahyudi, T., & Nofianti, N. (2025). Belanja modal dan pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia: Sebuah kajian sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 4(1), 22–46. <https://doi.org/10.24246/dekat.v4i1.18165>
- Widodo, S. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, penerimaan pembiayaan dan penanaman modal tetap bruto terhadap alokasi belanja modal daerah Provinsi Kawasan Barat dan Timur Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i1.19>